

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Dian Yustriawan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

dianyustriawan@umsu.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 10 Oktober 2021
Disetujui : 11 Nopember 2021
Dipublikasi : 15 Nopember 2021

ABSTRAK

Dana perimbangan keuangan pusat ke daerah apabila dialokasikan secara optimal dan mengacu pada skala prioritas, maka daerah akan berkembang. Pelayanan publik beserta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perkembangan perekonomian daerah merupakan faktor penting dalam pertumbuhan pendapatan daerah. Pengalokasian belanja modal pada daerah di dasarkan pada tingkat kebutuhan daerah terhadap sarana dan pra sarana dalam memberikan fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dan bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam tahun 2011-2015 yang terdapat di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Analisis data dengan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan Dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

Keywords: Dana Perimbangan, belanja modal dan pendapatan per kapita

PENDAHULUAN

Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai sumberdaya daerah secara optimal untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita daerah menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat mendeskripsikan kondisi perekonomian masyarakat pada suatu daerah. Besaran nilai pendapatan perkapita pada satu daerah akan tergantung pada perkembangan kegiatan perekonomian pada daerah yang didukung oleh berbagai sarana dan prasarana serta pelayanan publik yang baik. Demikian juga Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/kota memiliki pertumbuhan pendapatan perkapita daerah yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan ekonomi daerah yang ditunjang oleh sarana dan prasarana serta pelayanan publik.

Total Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sebesar Rp.8,488 trilyun rupiah dengan PAD sebesar Rp.4,944.502 atau 58,25%. Rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat

desentralisasi keuangan sangat baik 58,25%. Artinya kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara memiliki ketergantungan pada dana pusat/fiskal sebesar Rp. 3,544 trilyun rupiah atau 41,75%. Tetapi nilai tersebut belum bisa dijadikan sebuah indikator bahwa tingkat pendapatan perkapita daerah kabupaten/kota Sumatera Utara lebih bagus dari pada daerah-daerah lainnya. Pelayanan publik beserta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perkembangan perekonomian daerah merupakan faktor penting dalam pertumbuhan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah secara langsung akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat tidak terlepas dari pemerintah pusat. Sebagaimana Simanjuntak (2002:23) menyatakan bahwa transfer dari pusat untuk pemerintah daerah berperan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Adapun pendapatan perkapita daerah merupakan hal penting dalam menentukan seberapa besar dana alokasi umum (DAU) yang akan diterima daerah dari pusat, sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Bentuk Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Selanjutnya dengan pemanfaatan sumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang optimal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik masyarakat yang akan mendorong investor dalam melakukan kegiatan yang membantu perkembangan ekonomi daerah. Kondisi demikian akan secara langsung meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Sebagaimana penelitian Walidi (2008) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Kualitas pelayanan publik berhubungan dengan tingkat belanja modal daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan pra sarana untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Situngkir, 2009:17). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pembentukan modal daerah dalam peningkatan kualitas daerah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Dalam hal pembiayaan belanja modal, pemerintah daerah dituntut agar menggunakan anggaran pengeluaran yang mampu membangun kemandirian ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh peningkatan pendapatan perkapita. Penelitian Walidi (2008) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara dituntut untuk mampu mengendalikan keuangan daerah secara optimal, efisien, ekonomis dan efektif. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya adalah seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya potensi sumber daya alam, terbatasnya anggaran pembiayaan daerah dan sebagainya. Munir (2004:3) mengemukakan bahwa anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan uraian sebelumnya maka saya tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

STUDI LITERATUR

Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan satu kesatuan sumber pendanaan daerah yang secara umum memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus mengatasi ketimpangan vertikal yaitu antara pusat dan daerah serta mengatasi ketimpangan horizontal yaitu antar

daerah (Simanjuntak dan Hidayanto, 2002). Menurut Simanjuntak dalam Sidik, dkk (2002) pemberian transfer pusat ke daerah selain ditujukan untuk mengatasi disparitas horizontal dikarenakan adanya kesenjangan fiskal juga ditujukan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Dana perimbangan diharapkan mampu membantu pembiayaan daerah dalam rangka untuk menyelenggarakan pembangunan daerah pada berbagai bidang antara lain; pendidikan, kesehatan, sanitasi, ekonomi dan berbagai sarana pra sarana penunjang lainnya. Pembangunan daerah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan perkapita yang berkelanjutan. Sebagaimana Kuncoro (2003) menyatakan bahwa perlu menjaga sustainability pembangunan dalam jangka yang lebih panjang sehingga pembangunan bukan hanya merupakan tujuan tetapi juga merupakan alat proses instrumental untuk menurunkan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pembangunan daerah dengan berbagai perbaikan dan peningkatan fungsi pelayanan pada sektor publik akan meningkatkan investasi. Investor akan terdorong untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan munculnya berbagai usaha-usaha produksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan mampu menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Penelitian Hasyimah (2012) dengan judul Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita (Studi empiris pada Kabupaten dan Kota pemerintah daerah tingkat II Provinsi Jawa Tengah). Adapun metode analisis data menggunakan analisis jalur dengan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah dengan pendapatan perkapita, dan dana alokasi umum dengan belanja modal memiliki korelasi yang signifikan. Sedangkan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pendapatan perkapita memiliki korelasi yang tidak signifikan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada sektor publik, pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan mengalokasikan pengeluaran daerah untuk mendorong produktivitas daerah. Sebagaimana Harianto dan Adi (2007;8) menyatakan bahwa alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara umum akan meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Nurhaida (2011) dengan judul Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal. Secara parsial hanya variabel retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita, pengaruh variabel belanja modal tersebut adalah intervening sebagian karena koefisien tidak langsung lebih kecil dari koefisien langsungnya. Demikian juga penelitian Afriani (2014) Pengaruh Belanja Modal dalam memediasi hubungan antara PAD dan DAU terhadap pendapatan perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan perkapita kabupaten/kota Provinsi Jambi. Terdapat pengaruh positif yang signifikan PAD terhadap belanja modal dan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. PAD berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sedangkan DAU berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian Ristriardani (2011) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil analisis Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan Pendapatan Perkapita daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan mempengaruhi Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketersediaan pelayanan publik akan mendorong investor untuk berinvestasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia di daerah yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat kegiatan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung mampu meningkatkan pendapatan perkapita daerah. Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan standar hidup. Negara yang memiliki pendapatan perkapita tinggi umumnya memiliki standar hidup yang tinggi juga. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup. Negara kaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik, hal tersebut tercermin antara lain dalam angka harapan hidup, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan jika dibandingkan dengan negara miskin. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai tingkat pendapatan perkapita.

Belanja modal menurut Halim (2002:73) merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal pada daerah di dasarkan pada tingkat kebutuhan daerah terhadap sarana dan pra sarana dalam memberikan fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya Abdullah dan Halim (2006:19) mengemukakan bahwa aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) dengan judul Determinan Belanja Modal dan Konsekwensi terhadap pendapatan perkapita (Studi kasus wilayah Jawa Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi kepada kabupaten/kota yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota sedangkan alokasi DAU dan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Jumlah Belanja Modal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kabupaten/kota di wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah disimpulkan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita yang ada pada masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota di wilayah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan metode kausal komparatif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2008:22). Selanjutnya penelitian dengan menggunakan metode kausal komparatif adalah desain penelitian pencarian empirik yang sistematis, dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung (Umar, 2008:28)

Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2007:72) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 33 kabupaten dan kota.

Adapun seluruh populasi penelitian digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik sampling jenuh (sensus). Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan adalah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Sugiyono (2007) istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah diolah secara statistik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan-laporan dan data-data yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2003:58). Adapun data sekunder penelitian adalah data Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal dalam tahun 2011-2015 yang terdapat di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id. dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggunakan alat seperti rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Adapun analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran pada variabel-variabel yang diteliti.

Analisis Structural Equation Modelling (SEM)

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Model Persamaan Struktural atau disebut dengan Structural Equation Modelling (SEM). SEM adalah merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Ferdinand (2006:7) mengungkapkan bahwa SEM memungkinkan mampu menjawab penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional (yaitu mengukur apa dimensi-dimensi dari sebuah konsep). SEM juga dapat digunakan secara bersamaan untuk mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang telah diidentifikasi dimensinya. Selanjutnya dalam pengolahan data penulis menggunakan bantuan software AMOS V.21.

HASIL

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap 33 Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara menggunakan data tahun 2011 – 2015.. Variabel yang digunakan yaitu Dana Perimbangan (X_1), Belanja Modal (Z_1) dan pendapatan perkapita (Y). Statistik deskriptif dari variabel yang dianalisis tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics (dalam 000)

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan (X_1)	1	251,02	1,681,94	605,90	296,389,
Belanja Modal (Z)	65	1,410	8,783	8,704	459
Income Perkapita (Y)	1	70,238,	956,334,	196,22	128,677,
	65	473	028	4,841	933
	1	7,930	74,471	27,022	12,997

Variabel Dana Perimbangan (X_1) menunjukkan jumlah dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa secara umum rata-rata Dana Perimbangan tahun 20011-2015 adalah sebesar Rp. 605,908,704 Milyar Rupiah, dengan

Dana Perimbangan tertinggi sebesar Rp. 1,681,948,783 Trilyun Rupiah dan yang terendah sebesar Rp. 251,021,410 Milyar Rupiah.

Variabel Belanja Modal (Z) yaitu belanja daerah yang berasal dari belanja langsung yang terkait dengan program ataupun kegiatan menyangkut masyarakat secara langsung. Berdasarkan Tabel 5.1. terlihat bahwa rata-rata Belanja Modal sebesar Rp. 196.224.840 Milyar Rupiah dengan nilai tertinggi Rp. 956.334.028 Milyar Rupiah dan terendah sebesar Rp. 70.238.473 Milyar Rupiah.

Pendapatan perkapita (Y) yang diperoleh adalah sebesar Rp. 27.022.879 Juta Rupiah. Pendapatan per kapita tertinggi sebesar Rp. 74.471.405 Juta Rupiah dan terendah sebesar Rp. 7.930.884 juta Rupiah. Rata-rata pendapatan perkapita tertinggi adalah Rp. 74,471,406 dan rata-rata pendapatan perkapita terendah sebesar Rp. 7,930,884 pada setiap tahunnya.

Evaluasi atas *Regression Weight* untuk Uji Kausalitas

Setelah secara overall sebuah structural model dapat dianggap *fit*, maka dilakukan *convergent validity* untuk masing-masing indikator. Analisis ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan dan erat antara variable independen dengan variable dependent. Hasil analisis Regression Weights dapat dilihat pada Tabel pada tabel 2. sebagaimana berikut.

Tabel 2 : Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Hubungan Kausal	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label	Kesimpulan
BMD <--- DNP	.823	.229	3.594	***		Signifikan (Higly)
DAU <--- DNP	1.000					
DAK <--- DNP	.586	.077	7.612	***		Signifikan (Higly)
DBH <--- DNP	1.241	.094	13.268	***		Signifikan (Higly)
PKP <--- DNP	-.454	.282	-1.613	.107		Tidak Signifikan
PKP <--- BMD	.205	.099	2.076	.038		Signifikan

Sumber : Output AMOS 21

Evaluasi atas *Regression Weight* untuk kausalitas menggunakan nilai *Critical Ratio (CR)*. Kekuatan dimensi-dimensi yang membentuk faktor laten dapat diuji menggunakan *Critical Ratio (CR)* terhadap *regression weight* yang dihasilkan oleh model. CR identik dengan t_{hitung} dalam analisis regresi. CR yang lebih besar dari 2.0 (Ferdinand, 2000) menunjukkan bahwa variabel-variabel itu secara signifikan merupakan dimensi dari faktor. Selain itu juga ditunjukkan oleh tanda hasil output AMOS dengan tanda *** yang menunjukkan probabilitas dibawah alpha 5 % (0.05).

Berdasarkan Tabel 5.6 yang menunjukkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa:

1. Dana Perimbangan (X_1) secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Modal (Z) dengan nilai $p = ***$ ($*** < 0,05$)
2. Belanja Modal (Z) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan perkapita (Y) dengan nilai $p = 0,038$ ($0,038 > 0,05$).
3. Dana perimbangan (X_1) secara tidak signifikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita (Y) dengan nilai $p = 0,107$ ($0,107 > 0,05$).

Selanjutnya untuk menjelaskan seberapa erat hubungan variable independent dengan variable dependent dapat diketahui dari hasil *standardized Regression Weight* sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
BMD	<--- DNP	.712
BMD	<--- PAD	.058
DAU	<--- DNP	.973
DAK	<--- DNP	.529
DBH	<--- DNP	.758
PKP	<--- DNP	-.395
PKP	<--- BMD	.207

Sumber : Output AMOS 21

Dikatakan memenuhi *convergent validity* jika nilai *loading factor* (*standardized regression weight*) > 0,5. Berdasarkan Tabel 5.7. dapat diketahui bahwa;

1. Dana Perimbangan (X_1) memiliki korelasi yang erat dengan Belanja Modal (Z) dengan nilai *loading factor* = 0,712 (0,712 > 0,5)
2. Belanja Modal (Z) tidak memiliki korelasi dengan Pendapatan perkapita (Y) dengan nilai *loading factor* = 0,207 (0,207 < 0,5).
3. Dana perimbangan (X_1) tidak memiliki korelasi dengan pendapatan perkapita (Y) dengan nilai *loading factor* = - 0,395 (- 0,395 < 0,5).

PEMBAHASAN

Transfer dana dari pusat ke daerah yaitu dana perimbangan pusat ke daerah merupakan hal penting untuk dilakukan, karena bertujuan; 1). Untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertical, 2). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal, 3). Untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum pada setiap daerah (Simanjuntak, 2003;24). Selanjutnya Halim dan Abdullah (2006;28) mengemukakan bahwa 90-95% total penerimaan pemerintah daerah dalam APBD bersumber dari dana perimbangan. Hal tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dana perimbangan pemerintah pusat kepada daerah dalam jangka pendek berfungsi untuk mengatasi ketidaksiapan fiskal daerah dalam berbagai pembiayaan daerah. Dana perimbangan tersebut diharapkan mampu mendorong daerah untuk berkembang dan dalam jangka panjang daerah mampu menciptakan perekonomian yang maju. Pertumbuhan ekonomi daerah dari berbagai sektor akan mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah sehingga tidak bergantung dengan pemerintah pusat. Adapun dana perimbangan pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari; 1) Dana Alokasi Umum, 2). Dana Alokasi Khusus, dan 3). Dana Bagi Hasil.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Hasil analisis *convergent validity* penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (*** < 0,05). Hasil penelitian yang diperoleh tersebut sejalan dengan hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) dan Hasyimah (2012), bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian besaran rata-rata dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH sebesar Rp.201.969.568 Milyar rupiah memberikan pengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Atau dapat dikatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi diperoleh dari dana perimbangan pusat ke daerah. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya korelasi yang erat antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal (0,712 > 0,5). Selanjutnya juga dapat diketahui dari hasil pengaruh langsung Dana Perimbangan dengan Belanja Modal yaitu 0,712.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan pembiayaan pemerintah yang secara langsung mendorong pembangunan daerah pada berbagai bidang seperti; pendidikan, kesehatan, ekonomi, social dan berbagai sarana prasarana. Hasil penelitian Halim dan Abdullah (2006;28) menjelaskan bahwa 90-95% total penerimaan pemerintah daerah dalam APBD bersumber dari dana perimbangan. Sebagaimana fungsi dari dana perimbangan daerah dalam jangka pendek adalah untuk mengatasi ketidaksiapan fiskal daerah dalam berbagai pembiayaan daerah. Maka dana perimbangan yang diterima daerah juga akan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita

Belanja modal tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita (0,038 > 0,05). Demikian juga hasil *loading factor* 0,207 < 0,5 menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak memiliki korelasi dengan Pendapatan perkapita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan public yang dilakukan pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Hal ini

disebabkan rata-rata kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Hasil penelitian yang diperoleh tersebut tidak sejalan dengan penelitian Harianto dan Adi (2007;15) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Demikian juga penelitian Walidi (2009) menunjukkan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian Hasyimah (2012) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan perkapita

Hasil penelitian pengaruh dana perimbangan daerah terhadap pendapatan per kapita diketahui nilai $p = 0,107 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Selanjutnya diketahui juga bahwa nilai *loading factor* adalah $-0,395 < 0,5$ yang artinya bahwa dana perimbangan tidak memiliki korelasi dengan pendapatan perkapita. Selanjutnya diketahui pengaruh langsung (*direct effect*) dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita adalah $-0,395$. Adapun hasil pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita sebagaimana pada Tabel 5.8. menunjukkan $0,147$. Demikian juga hasil dari perkalian antara koefisien jalur variabel independen (DNP) dengan variabel dependen (BMD) menunjukkan hasil yang sama yaitu $0,147$. Hal ini mengandung arti bahwa Belanja Modal merupakan variabel intervening untuk pengaruh Dana Perimbangan terhadap pendapatan perkapita.

Pengaruh total (*total effect*) dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita melalui Belanja modal sebagai variabel intervening sebagaimana pada Tabel 5.9. menunjukkan hasil $-0,248$. Demikian juga hasil dari penjumlahan nilai yang diperoleh dari pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung yaitu $-0,248 < 0,05$. Nilai yang diperoleh tersebut artinya bahwa Dana perimbangan secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita melalui Belanja modal sebagai variabel intervening. Hasil penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan asli daerah melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita
3. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI, Yogyakarta*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2015.
- Ferdinand A, 2006, Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. UNHAS. Makasar.
- Nazir. Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Riduwan. 2003. *Dasar-dasar Statistika*. Cetakan ke tiga. Alfabeta. Bandung.

- Ristriardani 2011. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Sidik, Machfud. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Djoko. 2002. *Dana Alokasi Umum di Masa depan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Walidi. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.